

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Jl. Tarakan No. 1 Cappa Ujung Parepare

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Parepare, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Abdul Rahman, SP
NIP. 196211081989031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	02
Pernyataan Telah Direviu	-
Pernyataan Tanggung Jawab	03
Ringkasan	06
I Laporan Realisasi Anggaran	08
II Neraca	09
III Laporan Operasional	10
IV Laporan Perubahan Ekuitas	11
V Catatan atas Laporan Keuangan	12
A Penjelasan Umum	12
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	-
B.2 Belanja Pegawai	20
B.3 Belanja Barang	21
B.4 Belanja Modal	22
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23
B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
C.1 Aset Lancar	24
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	24
C.1.1.1 Persediaan	24
C.2 Aset Tetap	26
C.2.1 Tanah	26
C.2.2 Peralatan dan Mesin	27
C.2.3 Gedung dan Bangunan	28
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.3 Aset Lainnya	29
C.3.1 Aset Lain-lain	29
C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	20
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga	30

C.5	Ekuitas	31
C.5.1	Ekuitas	31
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	32
D.2	Beban Pegawai	32
D.3	Beban Persediaan	33
D.4	Beban Barang dan Jasa	33
D.5	Beban Pemeliharaan	34
D.6	Beban Perjalanan Dinas	35
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	36
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	37
E.2	Surplus/Defisit-LO	37
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	37
E.4	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	37
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	37
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	37
E.4.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	37
E.5	Transaksi Antar Entitas	37
E.5.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	38
E.5.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	38
E.6	Ekuitas Akhir	39
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	40
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	40
F.2	Pengungkapan Lain-lain	40

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parepare, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Abdul Rahman, SP
NIP. 196211081989031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp942.740.647.00 atau mencapai 141.72% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp665.192.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp7,665,336,901.00 atau mencapai 99.67% dari alokasi anggaran sebesar Rp7,691,118,000.00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp30,108,722,696.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp199,230,633.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29,804,040,880.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp105,451,183.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21,177,262.00 dan Rp30,087,545,434.00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp878.359.144.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7,160,888,974.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6,282,529,830.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-5,693,160.00 dan Defisit Rp58.687.840,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp—6.223,841,990,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp29,546,048,270.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6,223,841,990.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6,765,339,154.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp30,087,545,434.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	665,192,000.00	942,740,647.00	140.00	729,153,351.00
Jumlah Pendapatan		665,192,000.00	942,740,647.00	140.00	729,153,351.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2,702,161,000.00	2,701,415,027.00	99.97	2,599,575,204.00
Belanja Barang	B.3	3,825,285,000.00	3,801,726,174.00	99.38	4,051,327,801.00
Belanja Modal	B.4	1,163,672,000.00	1,162,195,700.00	99.87	1,755,966,700.00
Jumlah Belanja		7,691,118,000.00	7,665,336,901.00	99.67	8,406,869,705.00

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PAREPARE
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	199,230,633.00	214,330,070.00
Jumlah Aset Lancar		199,230,633.00	214,330,070.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	18,995,993,600.00	18,995,993,600.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4,306,287,130.00	4,281,897,630.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	10,194,502,960.00	9,355,162,960.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	224,102,600.00	224,102,600.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-3,444,476,713.00	-3,399,264,913.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-438,546,702.00	-195,053,097.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-33,821,995.00	-28,315,393.00
Jumlah Aset Tetap		29,804,040,880.00	29,234,523,387.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	121,952,000.00	726,088,632.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2	-16,500,817.00	-618,020,819.00
Jumlah Aset Lainnya		105,451,183.00	108,067,813.00
Jumlah Aset		30,108,722,696.00	29,556,921,270.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	21,177,262.00	10,873,000.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21,177,262.00	10,873,000.00
Jumlah Kewajiban		21,177,262.00	10,873,000.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	30,087,545,434.00	29,546,048,270.00
Jumlah Ekuitas		30,087,545,434.00	29,546,048,270.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		30,108,722,696.00	29,556,921,270.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PAREPARE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	878,359,144.00	712,557,351.00
JUMLAH PENDAPATAN		878,359,144.00	712,557,351.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,712,420,689.00	2,588,882,764.00
Beban Persediaan	D.3	437,718,674.00	500,970,513.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,867,007,358.00	1,978,218,998.00
Beban Pemeliharaan	D.5	474,383,466.00	538,860,329.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,095,515,150.00	1,054,737,424.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	573,843,637.00	664,537,308.00
JUMLAH BEBAN		7,160,888,974.00	7,326,207,336.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6,282,529,830.00	-6,613,649,985.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	64,381,000.00	2,322,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0.00	119,177,210.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2,860,551.00	51,145,287.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	8,553,711.00	4,729,479.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		58,687,840.00	-70,439,402.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6,223,841,990.00	-6,684,089,387.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	29,546,048,270.00	13,206,771,506.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-6,223,841,990.00	-6,684,089,387.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0.00	15.327.080.947.00
Penyesuaian Nilai Persediaan	E4	0.00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	0.00	15.340.489.607.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	0.00	-13.408.660.00
Koreksi Lain-lain	E. 4.3	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E5	6.765.339.154,00	7.696.285.204,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E6	541.497.164,00	16.339.276.764,00
EKUITAS AKHIR		30,087,545,434.00	29,546,048,270.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare-- Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Pertanian Kementerian pertanian yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan sumber daya alam hayati nabati, serta keamanan pangan segar di wilayah Sulawesi Selatan, untuk menjalankan tugas tersebut SKP Kelas I Parepare memiliki visi dan misi yaitu :

a. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta kelihatan (fleksibilitas) suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan masa depan. Sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian **visi** Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare yaitu "Menjadi Instansi **yang Tangguh dan Terpercaya**

Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut :

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare mengemban misi :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Propinsi Sulawesi Selatan;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp7,665,336,901.00 atau 99.67% dari anggaran belanja sebesar Rp7,691,118,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		2,702,161,000.00	2,701,415,027.00	100.00
Belanja Barang		3,825,285,000.00	3,801,726,174.00	99.38
Belanja Modal		1,163,672,000.00	1,162,195,700.00	99.87
Total Belanja Kotor		7,691,118,000.00	7,665,336,901.00	99.67
Pengembalian Belanja			-730,256.00	0.00
Total Belanja		7,691,118,000.00	7,665,336,901.00	99.67

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -8.82%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran tahun 2018 mengalami penurunan
2. Penurunan Pagu Belanja Modal TA. 2018 karena sarana dan prasarana telah Perenuhi di TA. 2017

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	2,701,415,027.00	2,599,575,204.00	3.92
Belanja Barang	3,801,726,174.00	4,051,327,801.00	-6.16
Belanja Modal	1,162,195,700.00	1,755,966,700.00	-33.82
Total Belanja	7,665,336,901.00	8,406,869,705.00	-8.82

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,701,415,027.00 dan Rp2,599,575,204.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan

sebesar 3.92% atau senilai Rp 101.839.823,00 dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Karena ada beberpa pegawai yang mendapat keneikan gaji berkala, kenaikan gaji karena naik pangkat dan kenaikan gaji tunjangan fungsional

LAMPIRAN 1

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31	Realisasi 31	Naik (Turun) %
	Desember 2018	Desember 2017	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,308,540,283.00	2,169,576,204.00	6.41
Belanja Lembur	393,605,000.00	429,999,000.00	-8.46
Jumlah Belanja Kotor	2,702,145,283.00	2,599,575,204.00	3.95
Pengembalian Belanja Pegawai	-730,256.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,701,415,027.00	2,599,575,204.00	3.92

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3,801,726,174.00 dan Rp4,051,327,801.00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar -6.16% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena penurunan pagu anggaran belanja barang di TA. 2018 sebesar Rp 249.601.627,00.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31	Realisasi 31	Naik (Turun) %
	Desember 2018	Desember 2017	
Belanja Barang Operasional	1,106,574,450.00	1,171,555,460.00	-5.55
Belanja Barang Non Operasional	248,756,500.00	361,050,000.00	-31.10
Belanja Barang Persediaan	385,570,000.00	479,730,000.00	-19.63
Belanja Jasa	490,926,608.00	445,394,588.00	10.22
Belanja Pemeliharaan	474,383,466.00	538,860,329.00	-11.97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,095,515,150.00	1,054,737,424.00	3.87
Jumlah Belanja Kotor	3,801,726,174.00	4,051,327,801.00	-6.16
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,801,726,174.00	4,051,327,801.00	-6.16

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,162,195,700.00 dan Rp1,755,966,700.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar -33.82% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Penurunan pagu belanja modal karena sarana dan prasarana telah terpenuhi di TA. 2017. Di TA. 2017 pagu belanja modal sebesar Rp 1.758.917.000,00 sedang di TA. 2018 sebesar Rp 1.163.672.000,00

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322,855,700.00	303,630,700.00	6.33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	839,340,000.00	1,417,336,000.00	-40.78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	35,000,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	1,162,195,700.00	1,755,966,700.00	-33.82
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,162,195,700.00	1,755,966,700.00	-33.82

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp322,855,700.00 dan Rp303,630,700.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6.33% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena:

Pagu yang di anggarkan untuk belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2018 naik 6,33 % berupa pembelian aset peralatan dan mesin sebanyak 26 unit sebesar Rp 301.404.500,00 dan beban aset ekstrakuntabel sebanyak 30 unit sebesar Rp 21.451.200,00

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322,855,700.00	303,630,700.00	6.33
Jumlah Belanja Kotor	322,855,700.00	303,630,700.00	6.33
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	322,855,700.00	303,630,700.00	6.33

B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp839,340,000.00 dan Rp1,417,336,000.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami penurunan sebesar -40.78% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp 577.996.000,00 atau -40,78% di karenakan telah tercukupi sarana/prasarana fasilitas gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	839,340,000.00	1,417,336,000.00	-40.78
Jumlah Belanja Kotor	839,340,000.00	1,417,336,000.00	-40.78
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	839,340,000.00	1,417,336,000.00	-40.78

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. **LAMPIRAN 2**

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Bank BRI Parepare Reg. 0064-01-000085-3-01	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Saldo BP LS – Bendahara	0,00
Saldo BP- Pajak	0,00
Saldo BP lain - lain	0,00
Saldo UP	0.00
Kuitansi UP	0.00
Selisih Pembulatan	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	0,00

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp199,230,633.00 dan Rp214,330,070.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	214.330.070,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	385,570,000.00
Trasfer Masuk	43,211,400,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(3,813,649,00)
Pemakaian	(437,718,674.00)
Barang Usang	(1,880,014,00)
Transfer Keluar	(468,500.00)
Saldo per 31 Desember 2018	199.230.633,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan persediaan adalah berupa:

1. Mutasi tambah senilai Rp,428,781,400.00 berupa pembelian senilai Rp 385,570,000.00 yaitu ATK, Dokumen pendukung KH/KT, Bahan Lab. KH/KT, Komputer Suplies dan Percetakan sedangkan transfer masuk senilai Rp43,211,400.00 yaitu taransfer Dokumen utama KH/KT dari Pusat senilai Rp 42.746.150,00 dan Dokumen Utama KH dari Mamuju senilai Rp 465.250,00
2. Mutasi kurang senilai Rp,443,412,337.00 berupa koreksi penyesuaian persediaan senilai Rp 3,813,649,00 (koreksi penyesuaian harga), pemakaian untuk kegiatan operasional perkantoran senilai Rp437,718,674.00, Barang usang senilai Rp 1,880,014,00 yaitu pemusnahan dokumen KH sesuai berita acara Nomor 429.d/PL.320/K.48.D/07/2018 dan transfer keluar dokumen utama KH Rp468,500.00. sesuai surat peminjaman ke Pangkalpinang Nomor 603 /TU.230/K.48.D/11/2018 **LAMPIRAN 3**

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	199,230,633.00	214,330,070.00
Jumlah	199,230,633.00	214,330,070.00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18,995,993,600.00 dan Rp18,995,993,600.00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	4.175M2	JL.Cendrawasih Kec.Bacukiki, Kel. Lompoe Kota Parepare	1,291,641,000
2.	5.238M2	JL. Tarakan No.1 Cappa Ujung Kec. Ujung Kel.Ujung Sabbang Kota Parepare	12,713,276,000
3.	2.800M2	JL. Andi Mattalatta Kec.Mangempang Kab.Barru	2,436,275,600
4.	1.960M2	JL.Pelabuhan Awerange Kec.Batu Pute Kel.Siddo Kab.Barru	574,819,000
5.	150M2	Jl. Bypass Kec.Malili Kab.Luwu	40,248,000
6.	150M2	Jl. Pelabuhan Bangsalae Kec. Pitumpanua Kab. Wajo	90,535,000
7.	642M2	JL. Jalur Dua Kec.Bacukiki Kel.Bumi Harapan Kota Parepare	905,199,000
8.	5.000M2	JL. Poros Makassar Kec.Soppeng Riaja Kel.Siddo Kab. Barru	944,000,000
Jumlah			18,995,993,600

Nilai saldo Tanah pada Neraca SAIBA sama dengan nilai total KIB tanah pada aplikasi SIMAKBMN.Tanah pengadaan tahun 2016 nilai perolehan Rp 574.819.000,00 di Jln. Pelabuhan Awarange Kec. Batu Pute Kel. Siddo Kab. Barru seluas 1.960 M2 belum bersertifikat kepemilikan sehingga menjadi temuan BPK pada tahun Anggaran 2017,namun sudah ditindaklanjuti di tahun 2018 dan sudah mempunyai sertifikat dari BPN Barru dengan Nomor sertifikat kepemilikan BU 908835 **LAMPIRAN 4**

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4,306,287,130.00 dan Rp4,281,897,630.00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	4,281,897,630.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	301,404,500.00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0,00
Transfer Keluar	0,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(277,015,000.00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	4,306,287,130.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember. 2018	(3,444,476,713.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	861,810,417.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan aset peralatan dan mesin senilai Rp301,404,500,00 berupa pembelian:
 - Rak Besi 1 buah senilai Rp 3.370.200,
 - Papan Visual/papan nama 1 buah senilai Rp 41.500.000,
 - Teralis 1 buah senilai Rp 10.000.000,
 - Kursi Fiber Glas/kursi 6 buah senilai Rp 27.407.600,
 - A.C Split 4 buah senilai Rp 27.622.000,
 - Gordyn/kray 1 buah senilai Rp 10.000.000,
 - Microscope 1 buah senilai Rp 39.600.000,
 - Autoclave (alat laboratorium umum) 1 buah senilai Rp 24.999.700,
 - Shaker (alat laboratorium patologi) 1 buah senilai Rp 14.998.500,
 - P.C Unit 2 buah senilai Rp 21.405.000,
 - Finger Printer Time 3 buah senilai Rp 10.725.000,

- Lap Top 2 buah senilai Rp 20.178.000,
 - Sepeda motor 2 buah senilai Rp 49.598.500
2. Pengurangan aset peralatan dan mesin senilai Rp277.015.000.00 berupa penghentian aset dari penggunaan sesuai surat kepala stasiun no. 250.a./PL.110/K.48.D/04/2018 sbb;
- 1 (satu) Buah Mini Bus senilai Rp160,000,000.00
 - 9 (sembilan) Buah sepeda motor senilai Rp117,015,000.00
3. Peralatan dan Mesin yang sudah di hentikan dari penggunaannya senilai Rp 277.015.000,00 sudah dilakukan penghapusan dengan Risalah Lelang Nomor 242/73/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil lelang/penjualan senilai Rp 46.801.000,00 **LAMPIRAN 5**

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10,194,502,960.00 dan Rp9,355,162,960.00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	9,355,162,960.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Penambahan/perolehan KDP	57.650,000.00
Pengembangan KDP	781,690,000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0,00
Transfer Keluar	0,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	10,194,502,960.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(438,546,702.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	9.755,956,258.00

Transaksi mutasi tambah dengan penambahan/perolehan KDP senilai Rp 57,650,000,00 yaitu konsultan perencanaan, pengembangan KDP senilai Rp

781.690.000,00 yaitu pagar permanen IKH, Gedung Pos Jaga Permanen 50 dan Gedung Pos Jaga Permanen type 70

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp224,102,600.00 dan Rp224,102,600.00.

C.2.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-3,916,845,410.00 dan Rp-3,622,633,403.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4,306,287,130.00	-3,444,476,713.00	861,810,417.00
2.	Gedung dan Bangunan	10,194,502,960.00	-438,546,702.00	9,755,956,258.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	224,102,600.00	-33,821,995.00	190,280,605.00
	Akumulasi Penyusutan	14,724,892,690.00	-3,916,845,410.00	10,808,047,280.00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp121,952,000.00 dan Rp726,088,632.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare serta dalam proses penghapusan dari BMN. **LAMPIRAN 6**

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-16,500,817.00 dan Rp-618,020,819.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	121,952,000.00	-16,500,817.00	105,451,183.00
	Akumulasi Penyusutan	121,952,000.00	-16,500,817.00	105,451,183.00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21,177,262.00 dan Rp10,873,000.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	20,869,662.00	9,864,000.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	307,600.00	1,009,000.00
Jumlah	21,177,262.00	10,873,000.00

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan PNS (511129) senilai Rp 20.722.000, dan kekurangan gaji PNS senilai Rp 147.662, adalah (511111) Senilai Rp 131.800, 511112 Senilai Rp 13.180, 511122 Senilai Rp 2.636 dan 511119 Senilai Rp 46. Sudah ditindak lanjuti dan dilakukan pembayaran
2. Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp 307.600,- berupa langganan air (522113) juga sudah ditindak lanjuti dan dilakukan pembayaran/pelunasan. **LAMPIRAN 7**

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30,087,545,434.00 dan Rp29,546,048,270.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp878,359,144.00 dan Rp712,557,351.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
(425331) Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	758,399,144.00	712,557,351.00	19.01
(425699) Pendapatan Jasa Lainnya	119,960,000.00	,00	
Jumlah	878,359,144.00	712,557,351.00	19.01

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 165.801.793,00 atau 19,01% dibandingkan TA 2017 karena adanya penambahan pendapatan jasa lainnya serta semakin meningkatnya pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. **LAMPIRAN 8**

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,712,420,689.00 dan Rp2,588,882,764.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	1,583,234,000.00	1,507,262,500.00	5.03
Beban Pembulatan Gaji PNS	23,285.00	20,524.00	13.23
Beban Tunj. Anak PNS	36,159,100.00	28,853,702.00	25.31
Beban Tunj. Beras PNS	93,804,360.00	87,773,040.00	6.87
Beban Tunj. Fungsional PNS	169,080,000.00	144,065,560.00	17.36
Beban Tunj. PPh PNS	1,445,550.00	1,831,318.00	-21.07
Beban Tunj. Struktural PNS	20,180,000.00	16,900,000.00	19.41
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,971,530.00	93,199,120.00	24.42
Beban Tunjangan Umum PNS	33,529,864.00	37,350,000.00	-10.23

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Uang Lembur	393,605,000.00	429,999,000.00	-8.46
Beban Uang Makan PNS	265,388,000.00	241,628,000.00	9.83
Jumlah	2,712,420,689.00	2,588,882,764.00	4.77

Beban pegawai per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,77% atau senilai Rp123.537.925.,00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena terdapat penambahan beban tunjangan anak/istri PNS dan penambahan tunjangan Fungsional PNS.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp437,718,674.00 dan Rp500,970,513.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	437,718,674.00	500,970,513.00	-12.63
Jumlah	437,718,674.00	500,970,513.00	-12.63

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,867,007,358.00 dan Rp1,978,218,998.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	21,451,200.00	0.00	0.00
Beban Bahan	238,956,500.00	342,350,000.00	-30.20
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160,800,000.00	114,280,000.00	40.71
Beban Honor Output Kegiatan	9,800,000.00	18,700,000.00	-47.59

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Jasa Lainnya	56,000,000.00	12,500,000.00	348.00
Beban Jasa Profesi	39,300,000.00	21,300,000.00	84.51
Beban Keperluan Perkantoran	818,408,650.00	939,281,000.00	-12.87
Beban Langganan Air	13,981,030.00	12,539,150.00	11.50
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	123,496,759.00	93,657,953.00	31.86
Beban Langganan Listrik	153,436,008.00	159,394,151.00	-3.74
Beban Langganan Telepon	44,014,411.00	49,225,284.00	-10.59
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	115,368,000.00	100,320,000.00	15.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,997,800.00	17,674,460.00	-32.12
Beban Sewa	59,997,000.00	96,997,000.00	-38.15
Jumlah	1,867,007,358.00	1,978,218,998.00	-5.62

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp474,383,466.00 dan Rp538,860,329.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167,450,000.00	192,026,000.00	-12.80
Beban Pemeliharaan Jaringan	31,919,000.00	58,016,600.00	-44.98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275,014,466.00	288,817,729.00	-4.78
Jumlah	474,383,466.00	538,860,329.00	-11.97

Beban Pemeliharaan per 31 desember 2018 mengalami penuruna sebesar -11,97%di bandingkan 31 desember 2017 karena Pagu Anggaran Tahun 2018 untuk pemeliharaan menurun.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,095,515,150.00 dan Rp1,054,737,424.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	588,933,081.00	539,960,976.00	9.07
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	17,160,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	311,272,069.00	333,286,448.00	-6.61
Beban Perjalanan Tetap	195,310,000.00	164,330,000.00	18.85
Jumlah	1,095,515,150.00	1,054,737,424.00	3.87

Beban Perjalanan Dinas per 31 desember 2018 mengalami kenaikan 3,87% di bandingkan 31 desember 2017 karena beban perjalanan tetap naik senilai Rp 30.980.000.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp573,843,637.00 dan Rp664,537,308.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	243,493,605.00	209,051,122.00	16.48
Beban Penyusutan Irigasi	740,000.00	740,000.00	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	4,766,602.00	4,766,602.00	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,616,630.00	6,683,017.00	-60.85

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	322,226,800.00	443,296,567.00	-27.31
Jumlah	573,843,637.00	664,537,308.00	-13.65

Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 desember 2018 mengalami penurunan - 13,65% dibandingkan 31 desember 2017 karena penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	119,177,210.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6,673,697.00	4,729,479.00	41.11
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1,880,014.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2,860,048.00	36,871,287.00	-92.24
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	64.381.000.00	0.00	100.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	13,534,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	503.00	00	100.00
Jumlah	75.795.262,00	174,311,976.00	-100.92

Surplus /defisit dari kegiatan non operasional 31 desember 2018 mengalami penurunan -100,92% dibandingkan 31 desember 2017 karena pelepasan aset, penyesuaian nilai persediaan, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya , penerimaan kembali belanja modal tahun yang lalu dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu mengalami penurunan.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29,546,048,270.00 dan Rp13,206,771,506.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-6,223,841,990.00 dan Rp-6,684,089,387.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp15,327,080,947.00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-13,408,660.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp15,340,489,607.00.

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6,765,339,154.00 dan Rp7,696,285,204.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,665,336,901.00
Diterima dari Entitas Lain	-942,740,647.00
Transfer Keluar	-468,500.00
Transfer Masuk	43,211,400.00
Jumlah	6,765,339,154.00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-942,740,647.00 sedangkan DKEL sebesar Rp7,665,336,901.00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp43,211,400.00 yang terdiri dari: Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp43,211,400.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	Dokumen Utama KH /KT dari Pusat dan KH dari Mamuju	43,211,400.00
Jumlah			43,211,400.00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-468,500.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	Dokumen KH ke pangkalpinang	-468,500.00
Jumlah			43,211,400.00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30,087,545,434.00 dan Rp29,546,048,270.00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian I Parepare adalah sebagai berikut :

Kepala Stasiun/ Kuasa Pengguna Anggaran	: Abdul Rahman, SP
Kepala Urusan Tata Usaha	: Dra. Alice Sesa, MM
Kapala Sub Sie Pelayanan Operasional	: drh. Ahmad Nadif
Kuasa Pengguna Anggaran	: Abdul Rahman, SP
Pejabat Pembuat Komitmen	: drh. Ahmad Nadif
Pejabat Penandatanganan SPM	: Dra. Alice Sesa, MM
Bendahara Pengeluaran	: Normah Yulianti, SE
Bendahara Penerimaan	: Muhammad Nasir

Sampai dengan 31 Desember 2018 Stasiun Karantina Pertanian I Parepare telah melakukan Revisi DIPA dan POK sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 20 April 2018
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 23 Juli 2018
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 12 September 2018
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 30 Oktober 2018
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 23 November 2018
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 30 November 2018
7. DIPA Revisi 7 Tanggal 14 Desember 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA.2017 Nomor 30/SUBTIM5-L018/03/2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset tetap tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare dengan luas 1.960 M2 dari perolehan 2016 senilai Rp 574.819.000,00 sudah ditindak lanjuti tahun 2018 dengan Nomor Sertifikat BU 908835
2. Aset lain-lain senilai Rp 610.071.632,00 yang sudah dilakukan penjualan sesuai dengan salinan Risalah Lelang Nomor 140/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan pejabat lelang Handri, S.Mn dan penjual SKP Kelas I Parepare. Nilai hasil lelang senilai Rp 17.580.000,00 sudah di setor ke Kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia. Aset lain-lain tersebut sudah ditindak lanjuti di keluarkan dari Aplikasi SIMAK-BMN Tahun 2018.